

BAB IV

GAMBARAN UMUM SKPD KOTA PEKANBARU

A. Sejarah Singkat

Pada awalnya Pekanbaru dikenal dengan nama “Senapelan” yang dipimpin oleh Kepala Suku disebut Batin. Daerah yang pada mulanya sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan Senapelan berpindah ke tempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi muara sungai Siak.

Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan Senapelan. Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan kerjaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istananya di Kampung Bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Diperkirakan istana tersebut terletak di sekitar Mesjid Raya sekarang. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah mempunyai inisiatif untuk membuat Pekan di Senapelan tetapi tidak berkembang. Usaha yan telah dirintas tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali di tempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Rajab 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menjadi “Pekan Baharu” selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru.

Mulai saat itu sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer sebutan “Pekan Baru” yang dalam bahasa sehari-hari disebut **“Pekanbaru”**Perkembangan selanjutnya tentang pemerintahan di Pekanbaru selalu mengalami perubahan, antara lain sebagai berikut:

1. SK Kerajaan Besluit van Her Inlanche Zelf Bestuur van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919. Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut *District*.
2. Tahun 1931 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dikepalai oleh Controleur berkedudukan di Pekanbaru.
3. Tanggal 8 Maret Pekanbaru dikepalai oleh seorang Gubernur Militer disebut Gokung, Distrik menjadi Gun dikepalai oleh Gunco.
4. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103 Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminate atau Kota b.
5. Undang-undang No. 22 Tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
6. Undang-undang No.8 Tahun 1956 menyempurnakan status Pekanbaru sebagai kota kecil
7. Undang-undang No.1 Tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Desember 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi ibukota Provinsi Riau.
9. Undang-undang No. 18 Tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kota madya.

10. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota.

B. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru

Pembentukan satuan kerja perangkat daerah Kota Pekanbaru ditetapkan dalam Peraturan Daerah yaitu :

1. Peraturan Daerah no.7 tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
2. Peraturan Daerah no.8 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Peraturan Daerah no.9 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok Lembaga Tekhnis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

SKPD terdiri dari:

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal
6. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan
7. Badan Penanggulangan Bencana Pemadam Kebakaran

8. Badan Kepagawaian Daerah
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
10. Badan Lingkungan Hidup
11. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
12. Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan Keluarga Berencana
13. Badan Perpustakaan dan Arsip
14. Dinas Kesehatan
15. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
16. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
17. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
18. Dinas Kebersihan dan Pertamanan
19. Dinas Pasar
20. Dinas Pendidikan
21. Dinas Tenaga Kerja
22. Dinas Perumahan dan Pemukiman Cipta Karya
23. Dinas Tata Ruang dan Bangunan
24. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
25. Dinas Bina Marga dan Sumber Air
26. Dinas Pemuda dan Olahraga
27. Dinas Pertanian
28. Dinas Sosial Pemakaman
29. Dinas Pendapatan Daerah
30. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

31. Satuan Polisi Pamong Praja
32. Kantor Pendidikan dan Pelatihan
33. Kecamatan Pekanbaru Kota
34. Kecamatan Rumbai
35. Kecamatan Payung Sekaki
36. Kecamatan Sukajadi
37. Kecamatan Rumbai Pesisir
38. Kecamatan Senapelan
39. Kecamatan Tampan
40. Kecamatan Sail
41. Kecamatan Tenayan Raya
42. Kecamatan Marpoyan Damai
43. Kecamatan Lima Puluh

C. Visi dan Misi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru

Pada penelitian ini terdapat 32 unit satuan kerja perangkat daerah yang terdiri dari Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan dan Inspektorat di lingkungan Pemerintahan Kota Pekanbaru diantaranya:

1. Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Visi Dinas Pendapatan Daerah:

“Terwujudnya peningkatan pendapatan daerah melalui tertib administrasi dan pelayanan yang lebih baik serta didukung oleh peran serta masyarakat”.

Misi Dinas Pendapatan Daerah:

- a. Mengamankan Penerimaan PAD dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak yang ditetapkan dalam APBD baik yang menjadi Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Pendapatan Daerah maupun yang dilaksanakan oleh Dinas/Instansi/Pengelola penerimaan lainnya.
- b. Mengkoordinir pelaksanaan pungutan pendapatan dan melakukan pembinaan teknis pungutan dengan memanfaatkan sumber potensi yang tersedia.
- c. Melaksanakan penggalian sumber-sumber pendapatan baru dalam usaha peningkatan pendapatan.
- d. Menerapkan Sistem dan Prosedur dalam rangka efektifitas pelayanan di bidang pendapatan.
- e. Melakukan pengawasan terhadap Sistem dan Prosedur sumber Pendapatan Daerah.

2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik:

“Terwujudnya Kota Pekanbaru yang aman, tentram dan bebas dari konflik dan berwawasan kebangsaan”.

Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik:

- a. Meningkatkan kemampuan SDM Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- b. Mewujudkan rasa tertib, tentram, aman dan harmonis serta menumbuh kembangkan suasana yang kondusif ditengah masyarakat Kota Pekanbaru yang heterogen.

- c. Mewujudkan kerukunan dan toleransi antar umat beragama dengan memfungsikan lembaga-lembaga keagamaan.
- d. Membina dan meningkatkan kesadaran berpolitik masyarakat melalui pendidikan politik yang berkesinambungan serta melakukan pembinaan dan koordinasi dengan berbagai lembaga politik yang ada.

3. Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal

Visi Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal:

"Terwujudnya Pekanbaru Menjadi Kota Tujuan Investasi Melalui Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Prima"

Misi Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal:

- a. Melakukan penataan dan penyempurnaan sistem dan prosedur pelayanan.
- b. Meningkatkan sarana prasarana dan kualitas SDM aparatur pelayanan.
- c. Mewujudkan prinsip Good Governance dalam pelayanan perizinan dan non-perizinan.
- d. Menciptakan iklim investasi yang kondusif.
- e. Meningkatkan intensitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

4. Badan Kepegawaian Daerah

Visi Badan Kepegawaian Daerah:

"Terwujudnya pusat Pembinaan Aparatur Kota Pekanbaru yang berkualitas dan profesional untuk mendukung visi Pekanbaru 2021".

Misi Badan Kepegawaian Daerah:

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintahan Kota Pekanbaru.

- b. Menyusun pedoman pembinaan dan pengembangan SDM aparatur.
- c. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan kepegawaian dan karier pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru

5. Inspektorat

Visi Inspektorat:

“Terwujudnya Pemerintahan yang Baik Melalui Pengawasan yang Profesional”

Misi Inspektorat:

- a. Meningkatkan kualitas aparat pengawasan.
- b. Menumbuh kembangkan budaya pengawasan di lingkungan aparatur pemerintah.
- c. Mewujudkan manajemen pengawasan yang handal.
- d. Mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan bebas KKN.
- e. Mendorong akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Daerah.

6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata:

“Terwujudnya Kota Pekanbaru menjadi pusat kebudayaan melayu dan kota wisata yang bernuansa melayu berlandaskan iman dan taqwa”.

Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata:

- a. Melestarikan, membina dan mengembangkan budaya Melayu ditengah-tengah masyarakat
- b. Menjadikan tempat-tempat wisata dan hiburan bebas dari perjudian, miras dan narkoba.

- c. Menggali, melestarikan dan mengembangkan potensi objek-objek wisata.
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pihak pengusaha dalam mewujudkan sadar wisata.
- e. Meningkatkan sumber daya aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

7. Dinas Pasar

Visi Dinas Pasar:

“Terwujudnya pasar sebagai pusat jual beli dan pelayanan menuju masyarakat yang berbudaya dan berwawasan lingkungan”.

Misi Dinas Pasar:

- a. Menumbuh kembangkan kesempatan bekerja dan berusaha.
- b. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur, Pengelola dan pedagang.
- c. Meningkatkan kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar.
- d. Meningkatkan pelayanan kepada pedagang dan pengunjung.

8. Badan Penanggulangan Bencana Pemadam Kebakaran

Visi Badan Penggulangan Bencana Pemadam Kebakaran:

“Terwujudnya profesionalisme dalam memberikan pelayanan dan perlindungan bagi warga kota Pekanbaru dari bencana kebakaran”

Misi Badan Penanggulangan Pemadam Kebakaran:

- a. Terselenggaranya organisasi Pemerintahan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru sesuai UU dan Peraturan yang berlaku dan Perizinan Bangunan dibidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
- b. Menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat Kota Pekanbaru untuk mencegah terjadinya kebakaran.

- c. Terpenuhinya sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta terwujudnya pendirian Pos Pembantu Pemadam Kebakaran pada setiap kecamatan.
- d. Tercapainya profesionalisme petugas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru.

9. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

Visi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian:

“Terwujudnya Pemenuhan Hak Atas pangan Rumah Tangga, Penyuluhan Pertanian Yang Profesional Menuju Masyarakat Madani”.

Misi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian:

- a. Meningkatkan keseimbangan system ketahanan pangan dalam mewujudkan ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan.
- b. Meningkatkan koordinasi lintas pelaku dan wilayah dalam memantapkan ketahanan pangan wilayah sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional.
- c. Mendorong dan memfasilitasi peran serta masyarakat dalam upaya menciptakan kondisi ketahanan pangan ditingkat rumah tangga (mikro).
Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparat dan Kelembagaan ketahanan pangan wilyah.
- d. Mengoptimalkan potensi sumberdaya alam dan lingkungan strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan.
- e. Melaksanakan pengkajian dan perumusan kebijakan pemenuhan hak atas pangan.

- f. Meningkatkan peran serta penyuluhan pertanian secara professional dalam mewujudkan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas SDM.

10. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Visi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika:

“Terwujudnya Tingkat Kualitas Pelayanan dan Penyediaan Jasa Transportasi, Pos dan Telekomunikasi yang lengkap, menyeluruh, handal dan terjangkau”.

Misi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika:

- a. Meningkatkan dan memberdayakan SDM perhubungan yang berkualitas dan profesional.
- b. Memperbaiki, mempertahankan, meningkatkan aksesibilitas dan tingkat kualitas pelayanan perhubungan.
- c. Mengusahakan ketersediaan/kecukupan dan kehandalan prasarana, sarana, sistem jaringan transportasi.
- d. Meningkatkan koordinasi pelayanan dan pengawasan operasional perhubungan.